LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A Nomor 8

Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 2 TAHUN 1961 (2/1961)

Tentang : Perubahan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 1917 pasal 33 ayat (1) hal
Pemeriksaan Kas Daerah Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tertanggal 30 Juli 1960 Nomor 3843/II/A/60

Mengingat: 1, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958;
5. Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1917;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960.

Menimbang: 1. Bahwa ketentuan tentang pemeriksaan administrasi dan kas Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1917 pasal 33 ayat (1) tidak selaras lagi dengan keadaan dan perlu dirubah;

2. Bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah tentang tata-kerja Kantor Pengawas Keuangan perlu dikeluarkan Peraturan Daerah tentang "Perubahan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1917 pasal 33 ayat (1) hal "Pemeriksaan Kas Daerah Istimewa Yogyakarta."

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 28 Pebruari, 1 dan Maret 1961 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1917 pasal 33 ayat (1) hal pemeriksaan Kas Daerah Istimewa Yogyakarta." sebagai berikut:

Pasal 1

Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1917 pasal 33 ayat (1) diubah hingga berbunyi sebagai berikut:

"Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali pada waktu yang tidak diberitahukan lebih dahulu, administrasi dan Kas dari Kas Daerah Istimewa Yogyakarta diperiksa oleh Kepala Kantor Pengawas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta."

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Yogyakarta, 14 Maret 1961

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

SISWOSUMARTO.

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta", pada tanggal 4 Mei 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 8 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd.

HAMENGKUBUWONO IX.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 1961.

Tentang : Perubahan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1917 pasal 33 ayat (1) hal Pemeriksaan Kas Daerah Istimewa Yogyakarta

- I. Tentang Pemeriksaan administrasi dan Kas yang menjadi tanggungan "Kashouder" Kas Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1917

pasal 33 ayat (1) dan dijalankan oleh Kepala "Controle Bureau" dihadapan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (Kroonprins),

- II. Pada waktu sekarang kewajiban tersebut dalam angka I diatas dijalankan oleh Kepala Kantor Pengawas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gusti Pangeran Harjo Hadikusumo.
- III. Berhubung dengan ketentuan-ketentuan tersebut angka I dan II diatas sudah tidak selaras lagi dengan keadaan, maka ketentuan-ketentuan dalam Rijksblad tersebut diatas perlu diganti dengan ketentuan baru.
- IV. Didalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini. Kantor Pengawas Keuangan perlu berpegangan pada tugas-tugas pokok dari Kantor Pengawas Keuangan ialah:
 1. Menjaga keselamatan dan ketertiban tentang pemasukan dan penggunaan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jalan:
 - a. Membimbing dan mengawasi pembukuan mengenai penerimaan dan penggunaan uang dan benda-benda lainnya milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (termasuk uang dan benda ;untuk keperluan obyek-obyek pusat yang oleh Pemerintah Pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).
 - b. Memeriksa uang kas dan barang-barang lainnya yang mejadi tanggung jawab para Komtabel.
 - c. Memeriksa dan mengawasi masuk keluarnya uang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat-surat pertanggungangan jawab.
 - d. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sekurang-kurangnya tiap-tiap tiga bulan.
 2. Sewaktu-waktu diperlukan, dapat diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sesuatu keperluan, dan melalui Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 dan 2 : Telah cukup jelas.